

No.	Jumlah	
Terima Tgl:	Pembelian	332.4
No. Induk :	29 <del>02</del> 2000	PRA
	10 27 98	a

# ANALISIS JUMLAH UANG BEREDAR DI INDONESIA TAHUN 1996-1998

SKRIPSI



Oleh

*Helmi Yudho Drawiro*  
NIM. 9408101016 / SP

FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS JEMBER

2000





## JUDUL SKRIPSI

ANALISIS JUMLAH UANG BEREDAR DI INDONESIA  
TAHUN 1996 - 1998

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

**N a m a** : Helmi Yudho Prawiro

**N. I. M.** : 94 - 1016

**Jurusan** : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan

telah dipertahankan di depan Panitia Penguji pada tanggal :

30 Juni 2000

dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh gelar **S a r j a n a** dalam Ilmu Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

### Susunan Panitia Penguji

**Ketua,**



Dra. Aminah, MM.

NIP. 130 676 291

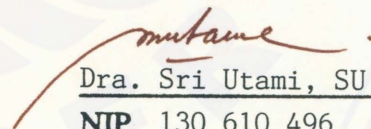
**Sekretaris,**



Drs. Agus Luthfi, M.Si.

NIP. 131 877 451

**Anggota,**



Dra. Sri Utami, SU.

NIP. 130 610 496

**Mengetahui/Menyetujui**  
**Universitas Jember**  
**Fakultas Ekonomi**  
**Dekan,**



Dr. H. Sukusni, M.Sc.

NIP. 130 350 764

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI SARJANA EKONOMI**

Nama : HELMI YUDHO PRAWIRO  
Nomor Induk Mahasiswa : 940 810 1016  
Tingkat : Sarjana  
Jurusan : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan  
Konsentrasi yang menjadi dasar  
Penyusunan Skripsi : EKONOMI KEUANGAN DAN PERBANKAN  
Dosen Pembimbing : I. Dra. Sri Utami. SU  
II. Dra. Anifatul Hanim

Disahkan di : Jember

Pada Tanggal :

**DISETUJUI DAN DITERIMA BAIK OLEH**

Dosen Pembimbing I,

Dosen Pembimbing II,

  
Dra. Sri Utami. SU

NIP : 130610496

  
Dra. Anifatul Hanim

NIP : 131953240

## PERSEMBAHAN

Karya ini merupakan perwujudan atas perjuangan dan do'a restu dari berbagai pihak atas izin dan ridho-Nya. Untuk itu karya ini kupersembahkan kepada :

- ♥ Yang terhormat dan tercinta papa H. suwardi dan mama Hj. Sri Subekti, yang telah mendidik dengan tulus dan penuh kasih sayang serta untaian do'a untuk ananda.
- ♥ Yang terhormat Bapak Ibu H. Sunhaji yang telah memberikan nasehat dan dukungannya.
- ♥ Almamaterku tercinta.
- ♥ Yang terkasih, Lilis Indawati SE yang selalu setia dalam memberikan dorongan, waktu, do'a, bantuan serta segalanya.
- ♥ Adikku Petty, Barretta, Tovyana yang selalu penuh keceriaan.



## KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “ Analisis Jumlah Uang Beredar di Indonesia Tahun 1996 – 1998 “ sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana (S-1) Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak secara moril maupun spirituil. Oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis sampaikan rasa terimakasih kepada :

1. Dra. Sri Utami, SU selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak membantu dan membimbing sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
2. Dra. Anifatul Hanim selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan saran dan bimbingan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
3. Drs. Sukusni, Msc, selaku Dekan Fakultas Ekonomi – Universitas Jember
4. Kepala Kantor Cabang Bank Indonesia Dati II Jember beserta staf dan karyawan.
5. Dosen dan karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
6. “ Anak-anakku (Izzul, Galih, Davud, Yoyok, Tessa)” di HALMAHERA II/24 ESTATE, terimakasih atas segala bantuan dan dorongannya selama ini.
7. Taufiqul Hadi, SE, terimakasih atas bantuan dan do'anya;
8. Ahmad Fahrudien, SE, Adik Aprilianto Basuki, Adik Wardoyo, Adik Unyil dan Sahabat-Sahabatku serta semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Akhirnya hanya Allaht SWT yang dapat membalas segala kebaikan yang telah diberikan oleh semua pihak. Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua, Amin.

Jember, Juni 2000

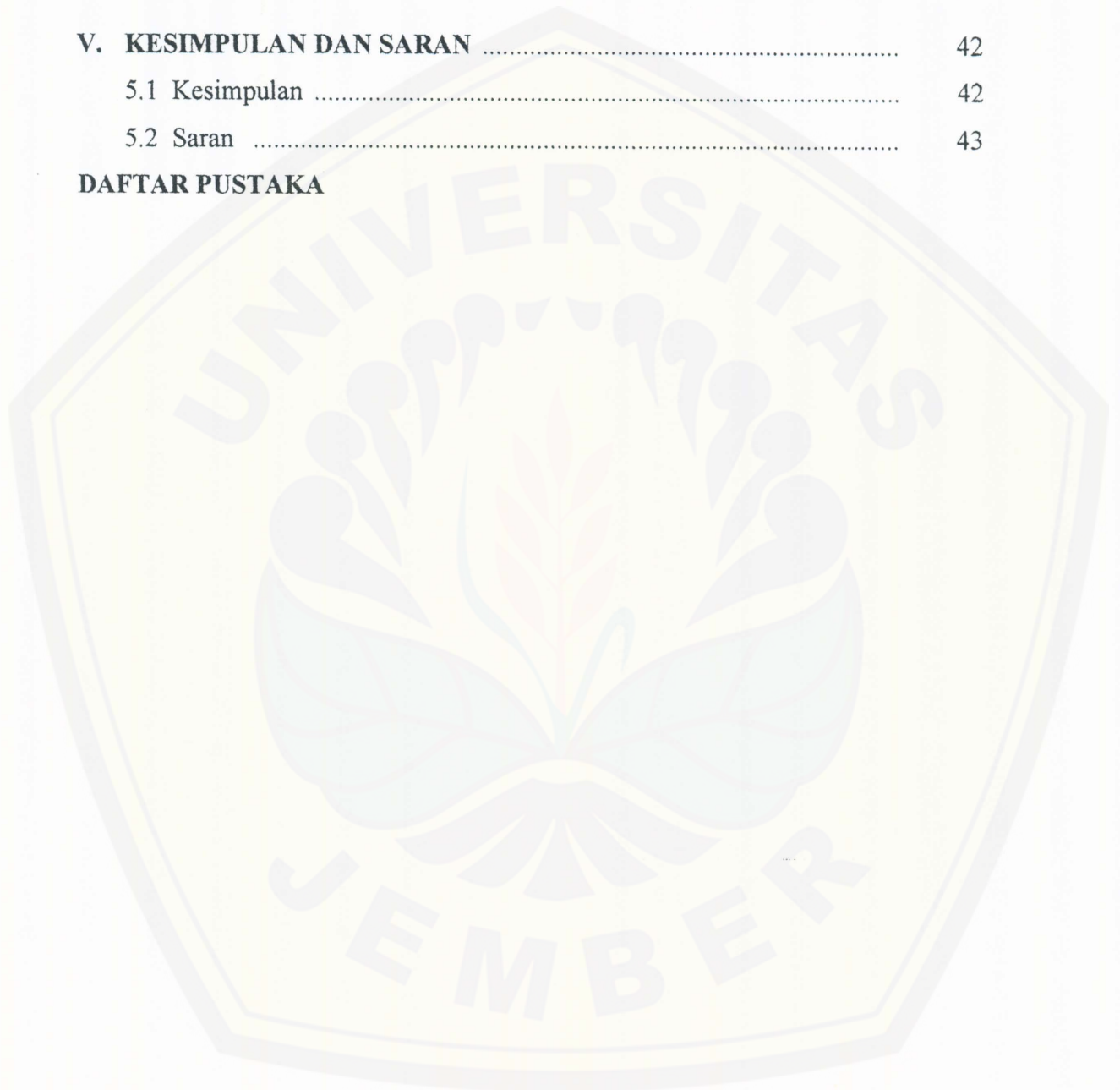
Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI .....	ii
HALAMAN MOTTO .....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI .....	vi
DAFTAR TABEL .....	viii
<b>I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Pokok Permasalahan .....	4
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	5
1.4 Metode Penelitian .....	5
1.5 Definisi Operasional .....	6
<b>II. GAMBARAN UMUM PERBANKAN DAN UANG BEREDAR DI INDONESIA .....</b>	<b>7</b>
2.1. Kebijakan Perbankan dan Isu yang terkait .....	7
2.2. Sistem Keuangan di Indonesia .....	13
2.3. Dewan Moneter .....	14
2.4. Jumlah Uang Beredar .....	15
2.5. Uang Primer (Uang Inti) .....	16
2.6. Angka Pengganda Uang .....	17
<b>III. LANDASAN TEORI .....</b>	<b>18</b>
3.1. Konsep Penawaran Uang .....	18
3.2. Teori Penawaran Uang .....	26
3.3. Kebijakan Moneter .....	32
3.4. Angka Pengganda Uang .....	33



<b>IV. ANALISIS DATA</b> .....	35
4.1. Hasil Penelitian .....	35
4.2. Pembahasan .....	38
<b>V. KESIMPULAN DAN SARAN</b> .....	42
5.1 Kesimpulan .....	42
5.2 Saran .....	43
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 Perkembangan Jumlah Uang Beredar di Indonesia dari Tahun 1990 – 1995 (Miliar Rupiah) .....	15
Tabel 2 Jumlah Uang Beredar di Indonesia Tahun 1995. 1 – 1998. 2 (Miliar Rupiah) .....	16
Tabel 3 Perkembangan Uang Inti di Indonesia Tahun 1990 – 1995 .....	17
Tabel 4 Perkembangan Angka Pengganda Uang di Indonesia Tahun 1990 – 1995 .....	17
Tabel 5 Perhitungan Angka Pengganda Uang di Indonesia Tahun 1996. 1 – 1998. 2 .....	36
Tabel 6 Pertumbuhan Uang beredar di Indonesia Tahun 1996. 1 – 1998. 2 .....	37



## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pola gerak pembangunan nasional diarahkan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Tujuan pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam GBHN yaitu untuk mencapai tatanan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, merupakan tujuan luhur yang tidak mudah untuk diraih. Diperlukan suatu pola pembangunan ekonomi yang *sustainable* dari Pelita ke pelita sejak bendera Orde Baru dikibarkan. Stabilitas ekonomi merupakan salah satu syarat mutlak yang ikut membentuk iklim kondusif bagi jalannya proses pembangunan itu sendiri. Kebijakan stabilisasi dipandang perlu guna menjadi pendorong bagi berlangsungnya elemen kegiatan ekonomi yang bertugas menjadi penopang pembangunan ekonomi makro. Program stabilisasi adalah suatu paket kebijakan yang tujuan utamanya untuk menghapuskan ketimpangan antara dicerminkan oleh kenaikan tingkat harga dan defisit neraca pembayaran internasional (Nopirin 1989 ; 24).

Ketahanan ekonomi akan muncul dengan sendirinya sebagai konsekuensi logis. Jika stabilitas ekonomi dapat dijaga. Stabilitas yang sangat perlu mendapat perhatian diantaranya adalah stabilitas dalam pengendalian laju inflasi, tingkat pengangguran, dan keseimbangan neraca pembayaran yang kesemuanya itu merupakan permasalahan jangka pendek, disamping pertumbuhan ekonomi yang merupakan permasalahan jangka panjang (Boediono, 1988 ; 2).

Pemerintah telah dan tengah melakukan banyak langkah taktis dengan melakukan sederetan kebijakan mendasar yang kesemuanya bertujuan untuk mendorong terjadinya proses penyesuaian secara struktural dan kondisi yang ada. Berbagai kebijakan muncul baik yang bersentris fiskal maupun moneter, yang kesemuanya bermuara pada terciptanya ketahanan ekonomi. Ketahanan ekonomi yang ingin dicapai akan tercermin pada tingkat pertumbuhan yang tinggi, kondisi neraca pembayaran yang mantap, kestabilan sisi moneter dan tingkat inflasi yang rendah serta terkendali.

Sektor moneter merupakan salah satu sisi perekonomian yang patut mendapat sorotan dalam pembangunan ekonomi dalam rangka mencapai ketahanan yang stabil. Kebijakan sektor moneter dipandang penting karena dilihat dari peran utama yang harus dimainkannya yaitu menyediakan likuiditas makro yang cukup tanpa menimbulkan tekanan-tekanan dalam neraca pembayaran (Bank Indonesia, Laporan Tahunan 1988/1989 :3).

Kestabilan moneter pada umumnya merupakan salah satu indikator kestabilan perekonomian dan keberhasilan pembangunan dalam bidang ekonomi. Kestabilan moneter mempunyai pengaruh yang luas pada perekonomian secara keseluruhan. Kestabilan moneter menjamin peningkatan produksi, perluasan kesempatan kerja dan pembagian pendapatan masyarakat yang lebih adil. Oleh karena itu dalam ketatanegaraan pemerintah selalu berusaha untuk menciptakan dan mempertahankan kestabilan moneter dalam batas-batas tertentu. Sistem moneter yang baik akan dikembangkan dan lembaga-lembaga keuangan yang sehat akan diciptakan dan ditumbuhkan. Apabila keadaannya telah demikian maka mekanisme keuangan yang sehat relatif mudah untuk dicapai.

Mekanisme keuangan yang sehat adalah keuangan yang relatif stabil dan dinamis, artinya jumlah uang yang beredar di masyarakat selalu mengalami perubahan sesuai dengan perubahan permintaan uang dari masyarakat. Perubahan jumlah uang yang beredar bukan dalam arti yang negatif, tetapi dalam arti yang positif. Jumlah uang selalu mengalami perubahan baik dalam jumlah maupun dalam kualitasnya. Perubahan secara kuantitatif adalah perubahan jumlah uang beredar dalam arti jumlahnya, sedangkan perubahan kualitatif adalah perubahan dalam arti komposisi peredarannya.

Bank sentral selaku otoritas moneter berfungsi dalam mengatur, mengawasi, memelihara kestabilan nilai rupiah, mengkoordinasikan serta memberi bimbingan kepada bank-bank umum tentang tata laksana bank yang sehat. Dapat diartikan bahwa otoritas moneter hanyalah mengawasi besaran-besaran yang mempengaruhi jumlah uang yang beredar dengan menetapkan kebijaksanaan suku bunga selanjutnya akan berpengaruh terhadap pendapatan riil.



Jumlah uang beredar (Money Supply) ditentukan dan ditetapkan oleh bank sentral dengan tepat, tetapi bank sentral tidak menetapkannya secara langsung. Dalam hal ini bank sentral, lembaga keuangan dan masyarakat saling berinteraksi untuk menetapkan stok uang yang beredar. Bank sentral sebagai penguasa moneter mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat melalui instrumen yang terdiri dari politik pasar terbuka (Open Market Operation), politik cadangan minimum (Reserve Requirement), politik diskonto dan moral suasion. Hal ini berhubungan dengan pengawasan kebijaksanaan yang telah berlangsung dengan jalan menetapkan sasaran antara sebelum mencapai sasaran akhir (Nopirin ; 1986 : 56).

Laporan tahunan Bank Indonesia tentang aktiva luar negeri bersih (Net Foreign Assets) dibagi menjadi dua yaitu cadangan devisa dan nilai aktiva luar negeri lainnya. Cadangan devisa dianggap sebagai pencerminan prestasi perekonomian suatu negara terhadap negara lain. Semakin banyak ekspor barang dan jasa, semakin tinggi cadangan devisa yang diperoleh dikarenakan dengan mengekspor barang dan jasa akan bertambah pula uang asing di dalam negeri yang apabila dikurs atau dirupiahkan akan menambah jumlah uang yang beredar (Nopirin ; 1989 : 72). Sebagai akibat bertambahnya uang yang beredar akan mempunyai pengaruh inflator maka harga barang-barang akan naik secara keseluruhan. Demikian sebaliknya, apabila Bank Indonesia membayar kewajibannya atas nama pemerintah dengan menggunakan mata uang asing maka cadangan devisa akan mempunyai pengaruh deflator (Partadiredja ; 1985 : 121).

Analisis jumlah uang beredar merupakan variabel kunci bagi penguasa moneter dalam menentukan kebijaksanaan mengacu pada peningkatan jumlah uang beredar dan kondisi perekonomian dengan mengkaitkan perkembangan lembaga keuangan yang ada maka peningkatan jumlah uang beredar tak lepas dari kebijaksanaan pemerintah dengan paket deregulasi yang telah dikeluarkan merupakan faktor utama dalam mempengaruhi jumlah uang beredar.

Melalui kebijakan moneter yang berhati-hati, jumlah uang beredar diupayakan sedemikian rupa agar selalu sesuai dengan kebutuhan perekonomian, sehingga aktivitas ekonomi masyarakat dapat berlangsung sebagaimana mestinya. Jumlah uang beredar

mengalami peningkatan yang cukup besar setelah Indonesia mengalami krisis ekonomi, mengakibatkan inflasi melonjak tinggi.

Angka pengganda uang merupakan rasio antara stok uang dengan stok uang berkualitas tinggi. Angka pengganda uang merupakan variabel penting yang memengaruhi jumlah uang beredar semakin besar angka pengganda uang, maka dengan stok uang yang sama yang dikeluarkan bank sentral mengakibatkan jumlah uang beredar semakin besar. Hal ini karena setiap rupiah dari uang yang beredar menggunakan mata uang berkualitas tinggi. Sebaliknya deposito-deposito hanya menggunakan sejumlah rasio deposito cadangan dari uang berkualitas tinggi (dalam cadangan) setiap rupiah dari stok uang, dan rasio deposito mata uang. Dengan demikian jelaslah bahwa angka pengganda uang semakin besar jika makin kecil ratio deposito cadangan atau jika semakin kecil rasio deposito mata uang (Donbusch, Fisher : 1992 ; 332).

Ada dua pendapat yang berbeda tentang angka pengganda uang, ekonom Keneysian beranggapan bahwa angka pengganda uang berubah-ubah setiap saat sedangkan ekonom klasik beranggapan bahwa angka pengganda uang konstan atau paling tidak dapat diperkirakan besarnya. Kedua anggapan tersebut mempunyai implikasi yang berbeda terhadap jumlah uang yang beredar.

## 1.2 Pokok Permasalahan

Peranan uang dalam perekonomian sangat penting karena uang dapat memperlancar pertukaran dan meningkatkan efisiensi perekonomian. Perubahan jumlah uang beredar berkaitan dengan perkembangan lembaga keuangan yang ada dan kondisi perekonomian. Jika jumlah uang beredar terlalu besar melebihi jumlah yang diinginkan oleh masyarakat maka akan berdampak buruk pada harga-harga barang dan pada nilai uang itu sendiri..

Berdasarkan latar belakang permasalahan menarik untuk diteliti berapakah Angka Pengganda Uang dan Pertumbuhan Uang beredar di Indonesia sebelum dan saat berlangsungnya krisis ekonomi tahun 1996-1998.



## **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :

1. Besarnya angka pengganda jumlah uang beredar pada tahun 1996-1998
2. Pertumbuhan jumlah uang beredar pada tahun 1996-1998

### **1.3.2 Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai :

1. Bahan masukan untuk dijadikan bahan pertimbangan bagi pengambil keputusan dalam menentukan kebijakan untuk mengontrol jumlah uang beredar dalam rangka mencapai tujuan stabilitas ekonomi.
2. Referensi yang berhubungan dengan masalah moneter tentang uang beredar pada khususnya.

## **1.4 Metode Penelitian**

### **1.4.1 Jenis dan Sumber Data**

#### **1.4.1.1 Jenis Data**

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder tentang jumlah uang beredar yang berpola time series yang dimulai sejak tahun 1996 sampai dengan tahun 1998.

#### **1.4.1.2 Sumber Data**

Data yang digunakan diperoleh dari :

- a. Laporan tahunan Bank Indonesia beberapa terbitan.
- b. Tabel Keuangan Nasional dari BPS beberapa terbitan.



## 1.4.2 Metode Analisis Data

### 1.4.2.1 Analisis Angka Pengganda Uang

Menganalisis angka pengganda uang digunakan formula (Boediono, 1980 ; 126):

$$M = m \cdot B$$

secara matematis dapatlah dirumuskan bahwa :

$$m = \frac{M}{B}$$

M = Jumlah uang beredar (rupiah)

m = Besarnya angka pengganda

B = Besarnya uang inti (rupiah)

### 1.4.2.2 Analisis Pertumbuhan Jumlah Uang Beredar

Menganalisis pertumbuhan jumlah uang beredar digunakan formula sebagai berikut

$$M_t = M_0 (1 + g)^t$$

Diasumsikan  $t = 1$ , maka :

$$M_t = M_0 (1 + g)^1$$

$$M_t = M_0 + M_{og}$$

$$g = \frac{(M_t - M_0)}{M_0}$$

Dimana :

$M_t$  = Jumlah uang beredar tahun ke  $t$

$M_0$  = Jumlah uang beredar tahun ke 0

$g$  = Persentase pertumbuhan jumlah uang yang beredar

## 1.5 Definisi Operasional

- Angka pengganda uang adalah rasio antara jumlah uang beredar dengan besarnya uang inti.
- Jumlah uang beredar yang dimaksud dalam penelitian ini adalah jumlah uang dalam arti luas ( $M_2$ ) yaitu keseluruhan uang kartal dan giral yang dipegang masyarakat dan simpanan masyarakat pada bank ditambah dengan uang kuasi.

## II. GAMBARAN UMUM PERBANKAN DAN UANG BEREDAR DI INDONESIA

### 2.1 Kebijakan Perbankan dan Isu yang Terkait

Lembaga keuangan, khususnya sistem perbankan mulai berkembang sejak dikeluarkannya Undang-Undang No. 14 tahun 1967 atau biasa ditulis UU No. 14/1967 tentang perbankan. Undang-undang ini merupakan dasar hukum yang sah bagi pendirian, kepemilikan, usaha, kegiatan dan segala sesuatu mengenai usaha keuangan di bidang perbankan baik yang dikelola pemerintah, swasta, koperasi dan asing.

Berkaitan dengan bank-bank milik negara telah pula dikeluarkan undang-undang antara lain: Undang-Undang No. 13 tahun 1968 atau UU No. 13/1968 tentang Bank sentral, UU No. 17/1968 tentang Bank Negara Indonesia 1946 yang kemudian dikenal sebagai BNI, UU No.18/1968 tentang Bank Dagang Negara yang kemudian dikenal sebagai BDN, UU No. 19/1968 tentang Bank Bumi Daya yang kemudian dikenal sebagai BBD, UU No 20/1968 tentang Bank Tabungan Negara yang kemudian dikenal sebagai BTN, UU No. 21/1968 tentang Bank Rakyat Indonesia yang kemudian dikenal sebagai BRI dan UU No. 22/1968 tentang Bank Ekspor Impor Indonesia yang kemudian dikenal sebagai Bank EXSIM.

Bulan November 1969, Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan yang mengatur mengenai pembinaan sistem perbankan guna terciptanya situasi dan kondisi yang memungkinkan perkembangan perbankan di Indonesia. Kebijakan ini meliputi perbaikan struktur perbankan yang dilakukan antara lain melalui bujukan dan dorongan agar bank-bank melakukan penggabungan (*merger*), dan pemberian bantuan kepada sistem perbankan dalam pembiayaan fasilitas dan bantuan teknis dalam rangka reorganisasi perbankan. Selain itu, pada awal Repelita pertama pemerintahpun mengeluarkan kebijakan **anggaran berimbang** (*balance budget*) yang pada prinsipnya menghendaki agar total pengeluaran pemerintah sama dengan total penerimaan pemerintah. Sejak



tahun 1970 Indonesia juga mengenalkan dan menggunakan sistem devisa bebas di mana penduduk maupun bukan penduduk Indonesia diizinkan untuk menyimpan dan membuka rekening dalam valuta asing pada bank-bank devisa.

Repelita II, prioritas kebijakan moneter diarahkan pada pemberian dan perluasan lembaga kredit yang bertujuan untuk membantu usaha golongan ekonomi lemah dan menengah. Kegiatan itu antara lain diwujudkan dengan munculnya Kredit Investasi Kecil (KIK) dan Kredit Modal Kerja Permanen (KMKP) dan berbagai bentuk kredit kecil lainnya. Kemudian pada bulan April 1974 otoritas moneter mengeluarkan kebijakan anti inflasi melalui penetapan pagu kredit (*credit ceiling*), suku bunga dan pengaturan mengenai bank-bank asing. Pagu kredit ini dimaksudkan untuk mengendalikan ekspansi moneter secara langsung dan pemberian kredit likuiditas Bank Indonesia untuk sektor-sektor prioritas. Kebijakan ini dilaksanakan baik oleh Bank Indonesia, bank milik pemerintah, bank swasta maupun bank-bank lainnya. Tujuannya adalah untuk mendorong pembangunan, mengkonsolidasikan dan memperkuat kestabilan moneter.

Sistem pagu kredit dan kredit selektif ini telah mengubah sistem perbankan, khususnya bank-bank pemerintah, menjadi perpanjangan tangan birokrasi yaitu bertindak sebagai penyalur kredit pemerintah pada sektor-sektor yang di prioritaskan sesuai dengan suku bunga yang berlaku di sektor tersebut. Dana yang dipergunakan berasal dari pemerintah dan suku bunganya ditentukan oleh otoritas moneter. Hal ini akan mendorong Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan beberapa perusahaan swasta untuk terpaku dan memanfaatkan dana murah karena adanya kebijakan tersebut. Selain itu adanya ketentuan mengenai keharusan BUMN untuk menggunakan jasa perbankan milik negara mengakibatkan tugas bank-bank pemerintah untuk menghimpun dana masyarakat menjadi kurang mendapat perhatian yang memadai.

Pembatasan kredit dan perluasan usaha baik bank swasta maupun asing mengakibatkan persaingan menjadi timpang, karena hanya bank-bank pemerintah yang relatif memperoleh manfaat. Dengan sendirinya sistem perbankan di Indonesia saat itu didominasi oleh bank-bank milik pemerintah. Berkaitan dengan usaha untuk

menggairahkan kegiatan perbankan, maka pada Desember 1977 otoritas moneter mengeluarkan kebijakan mengenai penurunan cadangan wajib minimum dari 30 persen menjadi 15 persen. Tujuan secara makro kebijakan tersebut adalah untuk membatasi, mengawasi dan mengendalikan kemampuan bank-bank umum dalam melakukan ekspansi moneter (penciptaan kredit), secara mikro ketentuan cadangan minimum ini dimaksudkan untuk menjamin likuiditas dan usaha perbankan agar berjalan dengan baik dan sehat.

Awal Januari 1978 Bank Indonesia sebagai Bank sentral mengeluarkan kebijakan yang mengizinkan bank-bank umum untuk menentukan sendiri suku bunga deposito kurang dari tiga bulan. Kebijakan ini merupakan embrio dari kebijakan deregulasi perbankan di Indonesia.

Perubahan yang sangat mendasar pada sistem perbankan di Indonesia terjadi sejak dikeluarkannya kebijakan moneter 1 Juni 1983. Kebijakan tersebut pada dasarnya dimaksudkan untuk mengurangi ketergantungan bank-bank umum pada kredit likuiditas Bank Indonesia dan untuk mendorong mobilisasi atau penghimpunan dana masyarakat, meningkatkan efisiensi dan efektifitas bank-bank umum dalam mengalokasikan dan mengelola sumber-sumber yang dimiliki. Diharapkan bahwa adanya deregulasi ini dapat mendorong bekerjanya mekanisme pasar secara luas di sektor perbankan dan mengurangi campur tangan pemerintah dalam proses penghimpunan dana dan penyaluran kredit. Langkah yang disebutkan terakhir ini dilakukan antara lain melalui pemberian kebebasan kepada bank-bank umum untuk menentukan sendiri suku bunga tabungan dan deposito serta kredit yang diberikan. Akibatnya suku bunga berlomba untuk naik khususnya suku bunga bank-bank milik pemerintah yang mempunyai tendensi menyamai suku bunga bank-bank swasta. Mengkaji situasi tersebut Bank Indonesia mengambil tindakan jangka pendek berupa penyediaan kemudahan (fasilitas) gadai ulang dan menurunkan suku bunga di pasar dengan cara membatasi jumlah pinjaman tersebut menjadi maksimum 7,5 persen dari deposito yang dihimpun.



Tanggal 1 Februari 1984, otoritas moneter memperkenalkan adanya politik pasar terbuka dengan dikeluarkannya Sertifikat Bank Indonesia (SBI). SBI adalah sertifikat deposito yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Sertifikat ini oleh Bank Indonesia dapat dijual kepada bank-bank umum atau lembaga keuangan bukan bank dan dapat diperjual belikan diantara mereka atau didiskontokan kepada lembaga Sekuritas. Selanjutnya oleh lembaga Sekuritas SBI tersebut didiskonto ulang ke Bank Indonesia. Pada Februari 1985 diperkenalkan juga Surat Berharga Pasar Uang (SPBU). Adanya kebijakan 1 Juni 1983 dan kebijakan yang terkait dengan itu dimaksudkan agar fungsi perantara (*financial intermediary*) bank-bank umum lebih wajar dan dapat lebih mendekati fungsi Bank Indonesia sebagai "*lender of the last resort*".

Kalangan perbankan masih merasakan bahwa suasana deregulasi terkesan bersifat parsial. Hal ini nampak dengan masih adanya keharusan bagi BUMN untuk menggunakan jasa bank-bank pemerintah dan pembatasan pembukaan kantor-kantor cabang baru bagi bank-bank swasta nasional dan asing. Kendala tersebut menjadi salah satu alasan mengapa suku bunga perbankan masih relatif tinggi dan pelayanan jasa perbankan belum dapat dilaksanakan secara optimal. Berkaitan dengan permasalahan tersebut diatas maka pada tanggal 27 Oktober 1988, otoritas moneter mengeluarkan kebijakan baru yang dikenal dengan Pakto 1988. Kebijakan ini dimaksudkan untuk meniadakan hambata-hambatan yang dirasakan ada sebelumnya dan meningkatkan penerahan dana masyarakat, efisiensi lembaga keuangan dan perbankan, mendorong berkembangnya pasar uang dan modal dan memberi kemampuan yang lebih besar kepada otoritas moneter dalam melaksanakan kebijakan moneter. Paket ini meliputi antara lain: pemberian keleluasaan bagi bank-bank swasta nasional, bank perkreditan rakyat dan bank asing untuk mendirikan atau membuka kantor-kantor baru dan atau kantor cabang baru, penurunan cadangan wajib dari 15 persen menjadi dua persen, pembebasan bagi BUMN untuk menempatkan 50 persen depositonya di luar bank-bank milik pemerintah dan pengenaan pajak atas pendapatan bunga deposito berjangka. Keleluasaan ini mendorong bank-bank swasta nasional untuk semakin giat menggali dan



menghimpun dana masyarakat melalui terbitnya berbagai bentuk tabungan dan deposito dengan berbagai daya tarik seperti pemberian hadiah dan sebagainya. Dalam kaitannya dengan pendirian bank campuran dan pembukaan kantor cabang pembantu bank asing, pemerintah mengarahkan agar pemberian kredit bank-bank tersebut lebih ditekankan dalam rangka membiayai ekspor non migas. Bank Indonesia juga menetapkan batas maksimum pemberian kredit (*legal lending limit*) bank-bank kepada debitur atau debitur group, pemegang saham dan pengurus bank.

Melengkapi Pakto 1988, muncul pula kebijakan 20 Desember 1988 atau lebih dikenal dengan Pakdes 1988. Kebijakan ini ditujukan untuk mendorong perkembangan lembaga keuangan bukan bank khususnya asuransi dan lembaga-lembaga pembiayaan pembangunan yang tujuan utamanya adalah untuk mengembangkan pasar modal, memperluas sumber-sumber alternatif pembiayaan untuk kegiatan produksi dan juga usaha pengerahan dana masyarakat.

Pakto 1988 dan kebijakan pendukung lainnya disatu sisi telah memberi kemudahan-kemudahan, namun disisi lain mendorong adanya persaingan yang tidak selalu menguntungkan bagi bank-bank tertentu seperti BPR. Hal ini dikarenakan dengan adanya Pakto 1988 ruang gerak BPR dipersempit hanya sebatas kecamatan, dan jika tidak demikian maka BPR harus berubah menjadi bank umum atau bank pembangunan dengan menaikkan modalnya menjadi 10 miliar rupiah. Pemerintah menyadari dan memperhatikan hal itu, sehingga pada tanggal 25 Maret 1989 dikeluarkan paket kebijaksanaan baru yang berusaha menghilangkan batasan tersebut di atas. Satu hal penting yang diemban oleh paket kebijakan 25 Maret 1989 yaitu: memperbaiki bidang usaha, lokasi dan wilayah kerja BPR yang sudah ada di kota-kota besar.

Usaha untuk meningkatkan efisiensi industri perbankan terus ditingkatkan dengan dikeluarkannya Paket Kebijakan 29 Januari 1990 (Pakjan 1990). Paket ini konsisten dengan paket kebijakan sebelumnya yaitu adanya pembatasan kredit likuiditas Bank Indonesia dengan cara mengalihkan secara bertahap kredit tersebut menjadi kredit biasa melalui perbankan. Namun demikian kredit likuiditas masih dimungkinkan untuk



kegiatan tertentu seperti untuk pelestarian swasembada pangan, pengembangan koperasi dan peningkatan investasi. Untuk membantu usaha golongan ekonomi lemah melalui Pakjan 1990, pemerintah mewajibkan semua bank untuk menyediakan 20 persen dari kredit yang diberikan kepada pengusaha kecil yang dikenal dengan Kredit Usaha Kecil (KUK). Pemenuhan kewajiban ini juga dipakai sebagai salah satu kriteria kesehatan suatu bank oleh Bank Indonesia.

Kebijaksanaan Pakto 1988 dan kemudian dilanjutkan dengan Pakjan 1990 telah memberi pengaruh yang besar terhadap industri perbankan. Perkembangan perbankan ini telah mengakibatkan peningkatan kebutuhan tenaga perbankan yang profesional, perubahan tehnik operasional perbankan dan pola serta sikap bertanggung jawab dari perbankan untuk mengamankan kepentingan masyarakat. Sistem perbankan juga dituntut untuk meningkatkan daya saingnya di luar negeri dan karenanya perbankan di Indonesia diharuskan untuk mengikuti baku yang berlaku secara internasional. Berkaitan dengan itu pemerintah mengeluarkan kebijakan 28 Februari 1991 atau dikenal dengan Pakri 1991. Kebijakan ini memuat lima aspek yang meliputi aspek perizinan, kepemilikan dan kepengurusan, pedoman operasional atas dasar kehati-hatian, sistem pelaporan dan tata cara penilaian kesehatan bank. Kelima aspek tersebut diperlukan bagi pengembangan usaha perbankan yang sehat dan efisien guna memelihara kepentingan masyarakat. Salah satu aspek penting dari Pakri 1991 adalah ketentuan bertahap mengenai modal minimum atau dikenal "*capital adequacy ratio*" (CAR) sebesar delapan persen sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh *Bank for International Settlement* (BIS).

Sistem perbankan di Indonesia dengan adanya kebijakan tersebut telah mengalami perkembangan dan pergolakan. Namun dasar yang dipakai tetap bersumber pada UU No. 14/1967 yang dirasakan sudah tidak sesuai dengan perkembangan perekonomian pada awal tahun 1990an. Oleh karena itu dirasa perlu adanya undang-undang baru yang diharapkan mampu mengatasi perkembangan pada periode itu maupun pada saat yang akan datang. Berdasarkan pada kepentingan di atas maka pemerintah

menerbitkan Undang-Undang No. 7/1992 tentang Perbankan di Indonesia. Sebenarnya undang-undang ini telah lama dipersiapkan, namun karena pentingnya permasalahan yang dicakup maka diperlukan pembahasan yang mendalam dan melibatkan semua pihak yang terkait dengannya. Undang-undang ini hanya mengenal tiga macam bank di Indonesia yaitu Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Campuran, dan diharapkan akan menjadi dasar hukum bagi sistem perbankan di Indonesia di saat yang akan datang.

Otoritas moneter di samping melakukan kebijakan penentuan CAR juga mengambil kebijakan penarikan dana BUMN dari bank-bank umum tahun 1991 serta kebijakan lain yang terkait. Kebijakan penarikan dana BUMN dari bank-bank umum, khususnya bank-bank pemerintah, dapat dikatakan seperti pisau bermata dua. Di satu sisi kebijakan tersebut dapat menurunkan uang primer, dan di sisi lain kebijakan tersebut juga mengurangi deposito bank serta mengurangi kemampuan bank-bank umum untuk menciptakan kredit.

Pemerintah dalam rangka melaksanakan pembangunan yang mantap dan berkesinambungan tanpa mengalami kepanasan (*over heating*) serta mengendalikan laju inflasi, otoritas moneter telah pula mengambil kebijakan uang ketat dan penjadwalan kembali proyek-proyek pemerintah dan swasta yang dibiayai oleh pinjaman luar negeri. Kebijakan uang ketat antara lain dilakukan dengan menaikkan COR (*cut off rate*) SBI. Kenaikan COR SBI secara bertahap dapat mengurangi laju pertumbuhan uang primer dan pada gilirannya diharapkan dapat memperlambat laju pertumbuhan jumlah uang beredar dan laju inflasi di Indonesia.

## 2.2 Sistem Keuangan di Indonesia

Sistem keuangan merupakan suatu kesatuan sistem yang dibentuk dari semua lembaga keuangan yang ada dan kegiatan utamanya di bidang keuangan, yaitu menarik dana dari dan menyalurkannya kepada masyarakat. Keberadaan sistem keuangan ini diharapkan dapat melaksanakan fungsinya sebagai lembaga perantara dan lembaga



transmisi yang mampu menjembatani mereka yang kelebihan dan kekurangan dana, serta memperlancar transaksi ekonomi.

Sistem keuangan di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu: Sistem moneter dan lembaga keuangan lainnya. Sistem moneter terdiri atas otoritas moneter dan sistem bank umum. Otoritas moneter meliputi: Bank Indonesia (Bank sentral) dan Pemerintah pusat (Departemen Keuangan) atau lembaga keuangan pemerintah.

Fungsi otoritas moneter pada umumnya seperti yang diatur dalam UU NO. 13/1968, yang antara lain adalah mengeluarkan dan mengedarkan uang kartal sebagai alat pembayaran yang sah, memelihara dan mengelola serta menjaga posisi cadangan emas dan devisa, dan melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap lembaga keuangan bank dan non bank di Indonesia. Fungsi utama sistem moneter di Indonesia adalah: (a) menyelenggarakan mekanisme transaksi atau lalu lintas pembayaran yang efisien; (b) menjadi lembaga intermediasi yang mampu menjadi penghubung antara mereka yang kelebihan dana dengan yang kekurangan dana untuk keperluan investasi; (c) ikut menjamin terjadinya keseimbangan interen melalui penciptaan penawaran uang sesuai dengan kebutuhan riil perekonomian.

### **2.3 Dewan Moneter**

Berdasarkan UU No.13/1968 dikenal suatu lembaga non departemental di sektor moneter di Indonesia yang disebut dengan Dewan Moneter. Dewan ini terdiri atas Menteri Keuangan sebagai ketua, Menteri yang membidangi keuangan dan ekonomi sebagai anggota dan Gubernur Bank Indonesia juga sebagai anggota. Masuknya Gubernur Bank Indonesia dan anggota dari Departemen atau lembaga negara lainnya dalam Dewan Moneter diharapkan dapat memberi masukan (input) dan keberatan-keberatan terhadap kebijakan ekonomi moneter yang tidak sesuai dengan keadaan ekonomi yang dihadapi. Dengan sendirinya masukan dari Gubernur B.I. diharapkan dapat mencerminkan pendapat atau aspirasi semua lembaga keuangan yang ada dan di bawah pembinaan dan pengawasan B.I.

Berdasarkan UU No.13/1968 pasal 9, tugas dari Dewan Moneter adalah : (1) membantu pemerintah dalam perencanaan dan menetapkan kebijaksanaan moneter dengan mengajukan patokan-patokan dalam rangka usaha menjaga kestabilan moneter, pemenuhan kesempatan dan peningkatan taraf hidup rakyat;(2) memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah

#### 2.4 Jumlah Uang Beredar

Jumlah uang beredar di Indonesia sejak tahun 1990 selalu mengalami peningkatan, sejalan dengan semakin meningkatnya kegiatan ekonomi nasional. Jumlah uang beredar dari tahun 1990-1995 selalu mengalami peningkatan sesuai dengan perkembangan perekonomian, hal ini dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel. 1. Perkembangan Jumlah Uang Beredar di Indonesia dari Tahun 1990-1995 (milyar rupiah)

Tahun	M1	Perubahan		M2	Perubahan	
		Nilai	(%)		Nilai	(%)
1990	23.819	-	-	84.630	-	-
1991	26.342	2.5231	9,5%	99.059	14.429	14,56%
1992	28.341	1.999	7,05%	119.053	19.994	16,79%
1993	36.805	8.464	22,99%	145.202	26.149	18,00%
1994	45.374	8.569	18,88%	175.512	30.310	17,26%
1995	52.677	7.303	13,86%	222.638	47.126	21,16%

Sumber : Statistik Ekonomi – Keuangan Indonesia (diolah), Maret 2000.



Jumlah uang beredar berikut faktor yang dapat mempengaruhi bisa dilihat pada tabel 2.

Tabel. 2. Jumlah Uang Beredar dan faktor yang dapat mempengaruhi di Indonesia Tahun 1995.1 – 1998.2 (milyar rupiah)

Tahun	Kuartal	JUB. M2 (milyar)	Uang Primer	Cadangan Wajib		Suku Bunga Deposito	
				milyar	%	milyar	%
1996	1	232.492	31.051	3.591	2,40	19.558	14,96
	2	249.443	30.799	5.898	2,36	20.738	15,08
	3	259.926	31.360	6.230	2,39	21.176	14,84
	4	288.632	34.405	6.863	2,37	24.850	14,58
1997	1	294.581	35.353	7.207	2,44	24.578	13,90
	2	312.839	40.431	12.406	3,96	24.536	13,50
	3	329.074	36.638	12.341	3,77	28.484	25,82
	4	355.643	46.088	12.616	3,81	23.469	19,88
1998	1	449.824	59.412	15.644	3,47	20.456	25,42
	2	565.785	70.308	17.936	3,17	8.057	42,25

Sumber : Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia (diolah), Maret 2000.

## 2.5 Uang Primer (Uang Inti)

Konsep mengenai uang primer merupakan konsep yang penting dalam analisis uang beredar. Uang primer di Indonesia sebagai *monetary base* pada dasarnya merupakan pasiva atau kewajiban moneter dari otoritas moneter kepada bank-bank umum (BPUG) dan masyarakat di luar sistem perbankan. Kewajiban moneter terhadap BPUG terdiri atas kas dan saldo giro BPUG, sedangkan kewajiban moneter kepada sektor swasta domestik meliputi uang kartal dan saldo giro perusahaan dan perorangan. Dengan demikian uang kartal yang dipegang pemerintah dan simpanan giral pemerintah yang ada pada otoritas moneter tidak diperhitungkan sebagai komponen uang primer.

Perkembangan uang inti di Indonesia selalu mengalami peningkatan hal tersebut dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel. 3. Perkembangan Uang Inti di Indonesia Tahun 1990-1995

Tahun	Uang Inti	Perubahan (%)
1990	12.006	-
1991	12.335	2,91
1992	14.735	19,26
1993	17.606	19,48
1994	22.156	25,84
1995	25.852	16,68

Sumber : Statistik Ekonomi – Keuangan Indonesia (diolah), Maret 2000.

## 2.6 Angka Pengganda Uang

Angka pengganda uang merupakan rasio antara stok uang dengan stok uang berkualitas tinggi. Perubahan angka pengganda uang dipengaruhi oleh faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti pendapatan masyarakat, suku bunga, harapan masyarakat mengenai perekonomian dan penentuan cadangan wajib.

Angka pengganda uang di Indonesia nilainya relatif besar dan berfluktuasi dari waktu ke waktu, hal tersebut dapat dilihat pada tabel 4.

Tabel. 4. Perkembangan Angka Pengganda Uang di Indonesia Tahun 1990 – 1995

Tahun	JUB (M)	Uang Inti (B)	Angka Pengganda (M/B)
1990	84.630	12.006	7,05
1991	99.059	12.335	8,03
1992	119.053	14.735	8,08
1993	145.202	17.606	8,25
1994	175.512	22.156	7,92
1995	222.638	25.852	8,61

Sumber : Statistik Ekonomi – Keuangan Indonesia (diolah), Maret 2000.



## III. LANDASAN TEORI

### 3.1 Konsep Penawaran Uang

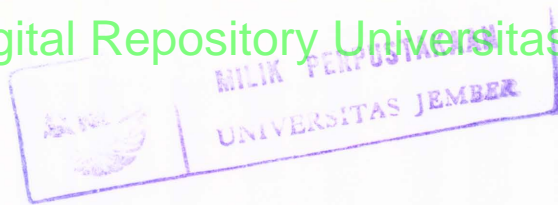
Konsep penawaran uang klasik mengemukakan bahwa jumlah uang yang beredar berada dalam kekuasaan pemerintah, akan tetapi dengan keluarnya pemikiran baru tentang penawaran uang modern yang mengungkapkan bahwa pemerintah bukan satu-satunya sektor yang mempengaruhi penawaran uang. Dalam teori moneter modern dikemukakan bahwa penawaran uang merupakan interaksi dari Bank Sentral sebagai pencipta uang inti, bank umum sebagai pencipta uang giral dan tingkah laku masyarakat untuk menentukan pilihan dalam bentuk apa kekayaannya akan diwujudkan (Boediono, 1988:85)

Penawaran uang (*Money Supply*) dalam teori moneter mempunyai arti yang sama dengan jumlah uang beredar (*Money Stock*). Berbagai faktor yang mempengaruhi kemampuan otoritas moneter dalam mengendalikan *money stock* dikenal sebagai elemen yang untuk mempengaruhi uang beredar. Berbagai teori penawaran uang dikemukakan oleh para ahli moneter. Jerry I Jordan mengemukakan cara berbagai faktor itu mempengaruhi *money stock*. Sebelum membangun model penawaran uang, Jordan menjelaskan beberapa konsep penting dalam elemen-elemen yang esensial dalam kaitannya dengan *money supply*, pertama: dibutuhkan informasi mengenai aspek institusional atau lembaga-lembaga dalam sistem perbankan, kemudian beberapa elemen penting model tersebut seperti uang inti, rasio cadangan lembaga bank dan deposito. Sebagian besar jumlah uang (dalam arti sempit) terdiri dari saldo rekening koran. Makin maju suatu perekonomian makin besar pula porsi rekening koran dalam jumlah uang, hanya bank-bank umum yang dapat memegang rekening sebagai hasil dari kegiatannya dalam pemberian kredit dan pembelian surat-surat berharga. Bank Sentral mempunyai pengaruh yang besar terhadap jumlah uang beredar melalui beberapa kebijaksanaan moneternya (Nopirin, 1989: 46)

Studi tentang penawaran uang beredar dilakukan oleh David I Fand, formulasi penelitiannya menggunakan model penawaran uang yang difokuskan jumlah uang beredar. Menurut model I Fand, jumlah uang beredar dipengaruhi oleh konsekuensi dari pemilihan portfolio, Bank Sentral, Bank Umum dan masyarakat. Bank Sentral menentukan uang inti, bank umum menentukan volume pinjaman yang dibutuhkan serta menentukan jumlah *excess reserves* dan *free reserves* yang akan dipegangnya. Masyarakat menentukan bagaimana mengalokasikan kekayaan diantara uang kartal, deposito dan time deposit. Dalam perekonomian modern “uang” termasuk bukan hanya uang kartal, tetapi juga uang giral, bahkan dikalangan negara-negara yang telah maju mempunyai uang giral mencakup tidak kurang dari 2/3 dari seluruh uang yang beredar. Pemerintah tidak mempunyai kekuatan langsung untuk menentukan uang giral (saldo rekening koran) diciptakan oleh bank-bank umum sesuai permintaan dari para nasabahnya. Jadi jumlah uang beredar atau penawaran uang merupakan hasil netto dari perilaku pemerintah (Bank Sentral), bank-bank umum dan masyarakat. Dari ketiga pelaku ini maka pemerintah mempunyai pengaruh besar, hal ini disebabkan karena pemerintah yang memegang monopoli penciptaan uang kartal. Bank hanya dapat menciptakan uang giral atas dasar sejumlah tertentu uang kartal yang dipegang bank tersebut, tanpa uang kartal tidak akan ada uang giral. Selanjutnya bank umum (bank komersial) berperan dalam penawaran uang melalui wewenangnya yang dapat menciptakan uang giral. Bank umum dapat menciptakan uang giral melalui penciptaan rekening giro untuk nasabahnya. Penciptaan uang giral oleh bank umum dibatasi melalui ketentuan jaminan yang diharuskan bagi bank umum. Jaminan yang diharuskan ini besarnya ditentukan oleh Bank Sentral dari rekening giro yang dimiliki oleh bank umum. Oleh karena itu, maka kemampuan bank-bank umum untuk menciptakan uang giral tergantung pada besarnya prosentase jaminan yang diharuskan oleh Bank Sentral.

Perkembangan perekonomian begitu pesatnya sehingga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan uang untuk tujuan transaksi, berjaga-jaga dan spekulasi, uang dapat didefinisikan sebagai M1 (*narrow money*), M2 (*broad money*), M3 (M2 + deposito dan tabungan mutual), M4 (M2 dan deposito yang dapat dinegosiasikan).





Namun secara garis besar definisi yang sering digunakan adalah M1 (*narrow money*) dan M2 (*broad money*). Pendefinisian ini secara teoritis belum dapat dilakukan mengingat pendapat dari masing-masing ahli ekonomi berlainan tergantung dari sudut mana akan menyelesaikan konsep penawaran uang (Indrawati, 1988: 11)

Konsep uang di Indonesia berdasarkan laporan bulanan Bank Indonesia terdiri dari uang primer (uang inti atau *reserver money*), uang dalam arti sempit (M1) dan uang dalam arti luas (M2). Uang primer merupakan kewajiban otoritas moneter yang terdiri dari uang kartal yang berada diluar Bank Indonesia dan Kas negara, rekening giro Bank Pencipta Uang Giral (BPUG) dan sektor swasta di Bank Indonesia. M1 terdiri dari uang kartal dan uang giral. M2 adalah uang dalam arti luas terdiri dari M1 ditambah dengan uang kuasi. Uang kuasi merupakan aktiva milik swasta domestik yang dapat memenuhi sebagian fungsi uang. Perubahan jumlah uang beredar ditentukan oleh adanya interaksi antara masyarakat, lembaga keuangan serta Bank Sentral (Nopirin, 1989: 157). Oleh sebab itu perubahan jumlah uang tidak sepenuhnya ditentukan oleh pemerintah .

### 3.1.1 Teori Penawaran Uang Konsep M1

Uang dalam arti sempit (M1) terdiri dari uang kartal dan uang giral, dalam sistem moneter M1 dimaksudkan sebagai uang yang memiliki sifat-sifat dapat dipakai sewaktu-waktu sebagai alat pembayaran yang sah untuk melakukan kegiatan ekonomi. Dalam konsep M1 ini tidak memasukkan deposito berjangka sebagai salah satu bagian dalam pengadaan uang sebagaimana yang dikemukakan oleh CF Scheffer dan M,JH Smeets (1978:2). Deposito berjangka tidak dapat dianggap sebagai uang, hal ini dikarenakan deposito berjangka hanya dapat diambil setelah jangka waktu yang telah disepakati terpenuhi, dengan demikian secara matematis dapat diformulasikan sebagai berikut (Lucket,1988:798)

$$M1 = C + D \dots\dots\dots 3.1$$

$$C = K \cdot D \dots\dots\dots 3.2$$

$$D = B \frac{1}{RD + K + X + tRt} \dots\dots\dots 3.3$$

Dengan memasukkan 3.2 dan 3.3 dalam persamaan 3.1 diperoleh persamaan baru mengenai M1, yaitu :

$$M1 = B \frac{1+K}{RD+K+X+tRt} \dots\dots\dots 3.4$$

Dimana :

- C = Uang Kartal
- D = Uang Giral
- RD = Cadangan Simpanan Giro (demand deposit)
- K = Rasio mata uang
- X = Rasio kelebihan cadangan
- t = Rasio deposit berjangka
- Rt = Cadangan deposit berjangka (time deposit)
- B = Uang inti

**3.1.2 Teori Penawaran Uang Konsep M2**

Konsep penawaran uang dalam arti luas atau M2 merupakan penjumlahan uang dalam arti (M1) ditambah dengan uang kuasi (*quasi money*). Dalam sistem moneter di Indonesia M2 sering disebut juga dengan likuiditas perekonomian (uang kuasi sebagai bagian dari M2) adalah aktiva milik sektor swasta domestik yang dapat memenuhi sebagian fungsi uang (Insukindro, 1992 : 89), Uang kuasi ini untuk sementara kehilangan fungsinya sebagai media pertukaran atau setengah likuid, sehingga uang kuasi ini baru dapat berfungsi sebagai alat transaksi bila sudah dikonversikan menjadi uang kartal atau giral.

Konsep uang dalam arti luas (M2) telah memasukkan deposito berjangka sebagai salah satu bagian dalam pengadaan uang. Dengan demikian dapat diformulasikan sebagai berikut (Lucket, 1988:308)

$$M2 = C + D + T \dots\dots\dots 3.5$$

Dimana :

$$T = Dt$$



Dengan demikian M2 berubah menjadi :

$$M2 = KD + D Dt \dots\dots\dots 3.6$$

Dengan memasukkan persamaan 3.3 pada persamaan 3.6 akan diperoleh persamaan M2 sebagai berikut :

$$M2 = B \frac{1+K+t}{RD+K+X+tRt} \dots\dots\dots 3.7$$

Terlihat adanya perbedaan antara M1 dan M2 dikarenakan M2 berhubungan langsung dengan besaran t yang disebabkan oleh cadangan deposito berjangka lebih rendah dibandingkan dengan syarat cadangan pada deposito permintaan (*demand deposit*), sehingga peralihan dana dari deposito permintaan ke deposito berjangka dapat mengurangi kebocoran kas.

**3.1.3 Pendekatan Baru Model Penawaran Uang**

Otoritas moneter pada umumnya dianggap masih dapat mengendalikan jumlah uang beredar melalui variabel-variabel yang langsung dikuasainya. Namun demikian harus disadari bahwa kemampuan otoritas moneter mengontrol uang beredar tergantung pada berbagai faktor, misalnya stabilitas angka pengganda uang dan kemampuan mereka memprediksi perilaku komponen angka pengganda tersebut serta tindakan apa yang diambil pemerintah.

Komponen angka pengganda uang dipengaruhi oleh perilaku bank-bank umum sebagai lembaga yang berorientasi kepada usaha untuk memperoleh keuntungan maksimum akan selalu berusaha agar supaya biaya oportunitas marginal (*marginal opportunity cost*) dari cadangan yang menganggur sama dengan manfaat marjinal yang diperoleh oleh bank tersebut. Ini berarti bahwa bank-bank umum akan berusaha melakukan penyesuaian terhadap portofolio mereka untuk meminimkan biaya atau memaksimalkan manfaat. Penyesuaian ini antara lain dapat dilakukan dengan **membiarkan komponen angka pengganda uang untuk bervariasi**. Variasi komponen angka pengganda dipengaruhi oleh variabel-variabel kunci permintaan uang yang secara

simultan akan berpengaruh terhadap penawaran uang. Dengan demikian variasi penawaran uang dipengaruhi secara bersama-sama oleh perilaku otoritas moneter, bank-bank umum dan masyarakat. Namun demikian studi empiris sering dihadapkan pada identifikasi sebagai akibat adanya kelangkaan kurva penawaran uang yang tepat dan benar. Hal ini terjadi karena penurunan atau penaksiran kurva tersebut dari data pengamatan mungkin tidak menghasilkan baik kurva penawaran uang maupun permintaan uang .

Identifikasi Saving Piers dan Thompson berpendapat bahwa: persoalan tersebut dapat diatasi dengan dua cara. Pertama, anggap bahwa pasar uang adalah seimbang dimana penawaran uang sama dengan permintaan uang, dengan kata lain bila pengamat dapat merumuskan permintaan uang, misalnya sebagai fungsi dari pendapatan dan suku bunga, maka dalam keseimbangan faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah uang yang ditawarkan dapat diamati. Kedua, anggap bahwa industri perbankan adalah industri yang berorientasi kepada usaha untuk mendapatkan keuntungan maksimum. Dengan demikian untuk suatu rasio antara giro dan uang kartal yang diinginkan oleh masyarakat, sistem perbankan akan menawarkan jumlah uang tertentu selaras dengan kebutuhan uang yang diinginkan masyarakat.

#### 3.1.4 Uang Primer

Pengertian uang inti adalah pasiva bersih otoritas moneter yang dipegang oleh bank-bank umum dan masyarakat bukan bank. Biasanya untuk mengamati perilaku uang primer dan komponen-komponennya perlu dianalisis neraca konsolidasi otoritas moneter. Uang inti sering dikenal pula sebagai *reserver money* atau uang primer. (Taguchi, 1994 ; 231). Uang inti tidak identik dengan uang kartal yang beredar, sebagai uang inti mencakup pula uang kartal yang tidak beredar tetapi dipegang oleh bank-bank dan termasuk pula rekening-rekening giro dari anggota masyarakat dan bank-bank yang disimpan dalam bank sentral, biasanya anggota masyarakat umum tidak banyak menyimpan uangnya sebagai rekening giro pada bank sentral. Jadi rekening giro dari masyarakat umum pada bank sentral dapat diabaikan.



Uang primer di Indonesia sebagai *monetary base* pada dasarnya merupakan pasiva atau kewajiban moneter dari otoritas moneter kepada bank-bank umum dan masyarakat di luar sistem perbankan, terdiri atas kas dan saldo giro BPUG, uang kartal dan saldo giro perusahaan dan perorangan. Uang primer terdiri dari beberapa komponen berikut saldo giro yang dipegang baik oleh bank-bank umum atau masyarakat pada bank Indonesia ditambah uang tunai yang dipegang baik oleh bank-bank umum maupun masyarakat umum sehingga dapat dirumuskan persamaan identitas *reserver money* :

$$RM = R + C \dots\dots\dots 3.8$$

dimana :

RM = uang primer

R = cadangan bank

C = uang kartal yang dipegang masyarakat di luar bank

### 3.1.5 Lembaga Keuangan

Lembaga keuangan dalam sistem perekonomian modern tidak dapat dilepaskan kaitannya dengan perkembangan ekonomi masyarakat. Lembaga keuangan ini terdiri dari lembaga keuangan bank dan non bank. Lembaga keuangan ini memproduksi barang atau jasa berupa jasa perantara dalam penyimpanan dan peminjaman uang serta penjualan surat-surat berharga. Sebagaimana bentuk-bentuk usaha yang lain lembaga keuangan ini juga bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dalam operasi usahanya. Terdapat dua pendekatan untuk menganalisis model lembaga keuangan, yaitu pendekatan tradisional di mana pada dasarnya lembaga keuangan serupa dengan perusahaan pada umumnya dan pada akhirnya mengarah pada pendekatan angka pengganda uang. Dalam pendekatan baru terdapat dua macam, pertama menjelaskan bahwa lembaga keuangan adalah lembaga yang labil sehingga diperlukan aturan khusus untuk menghindarkan dari ketidak stabilan ini. Kedua, menganalisis bahwa lembaga keuangan berusaha meminimalkan biaya untuk mendapatkan dan menghasilkan informasi tentang pasar.

Model penawaran uang melalui pendekatan baru dapat dirumuskan :

$$M = f(y, I, r_b, A) B \dots\dots\dots 3.9$$

Dimana :

- M = Jumlah uang beredar nominal
- y = Pendapatan nasional riil
- I = Suku bunga kredit
- r<sub>b</sub> = Suku bunga deposito
- A = Variabel lain yang berpengaruh terhadap uang beredar
- B = Uang inti

Fungsi penawaran uang dapat dirumuskan (Taguchi,1994:231)

$$M = mm \cdot H \dots\dots\dots 3.10$$

Dimana :

- M = Stock uang
- mm = Money multiplier
- H = Stok uang primer

$$mm = \frac{i + C_u}{R_e + C} \dots\dots\dots 3.11$$

Dimana :

- C<sub>u</sub> = *Currency unit*
- R<sub>e</sub> = Cadangan deposito
- i = Tingkat bunga

$$R_e = R(I, i_D, r_R) \dots\dots\dots 3.12$$

*Reserve requirement* dari bank komersiil jika kurang dari 100% maka biasanya sistem perbankan akan memenuhinya dengan deposito, atas dasar reserve (R) yang dipegang, maka bank-bank menciptakan uang giral (*demand deposit*) yang berupa saldo-saldo rekening koran yang dimiliki oleh masyarakat umum yang disimpan pada bank-bank,



biasanya jumlah deposito adalah sama dengan kebalikan dari *reserve requirement ratio* dikalikan dengan *reserve* (r)

$$D = \frac{1}{R} \cdot r$$

### 3.2 Teori Penawaran Uang

#### 3.2.1 Teori Penawaran Uang Menurut Brunner (1968:63)

Penciptaan uang yang beredar dalam perekonomian terbuka berdasarkan pada identitas uang beredar :

$$M = m B$$

M adalah jumlah uang yang beredar yang merupakan perkalian antara angka pengganda uang (m) dengan uang primer.

Pada perekonomian tertutup otoritas moneter dapat secara penuh menentukan uang beredar, apabila adanya stabilitas dari perilaku bank-bank dan masyarakat non bank. Namun hal ini tidak berlaku bagi perekonomian terbuka yang menganut sistem nilai tukar tetap. Pada kasus berikut uang beredar tidak hanya dipengaruhi oleh otoritas moneter tetapi juga oleh tindakan penduduk domestik dalam berniaga dengan orang luar negeri yang tercermin pada posisi neraca pembayarannya. Brunner melihat ini lebih jauh pada *monetary bank* dan hubungannya dengan neraca moneter. Dari sisi *liability* neraca otoritas moneter menggambarkan secara langsung jumlah *monetary base* yang dikeluarkan oleh otoritas moneter.

$$B = DR + CP$$

Dimana

DR = cadangan domestik dari bank-bank umum

CP = uang kartal yang dipegang oleh masyarakat.

Persamaan tersebut mencerminkan pola alokasi dari penggunaan *monetary base*. Jumlah uang primer yang dikeluarkan secara langsung oleh otoritas moneter dipegang oleh bank-bank umum sebagai cadangan dan oleh masyarakat sebagai uang kartal.

Pada perekonomian tertutup pinjaman bersih adalah identik dengan pinjaman yang dilakukan oleh bank-bank umum pada perekonomian terbuka ditawarkan alternatif lain untuk meminjam oleh bank-bank umum, yaitu dengan cara meminjam dari pasar kredit luar negeri sebagai substitusi dari meminjam dari bank sentral. Oleh karena itu pinjaman bersih bank komersial pada perekonomian terbuka dapat membantu usaha bank itu sendiri.

### 3.2.2 Teori Penawaran Uang Menurut Aghevli ( 1977:70)

Uang sempit (M1):

$$M1 = RM \frac{\frac{D+T}{R} \left(1 + \frac{D}{C}\right)}{\frac{D+T}{R} + \frac{D}{C} \left(1 + \frac{T}{D}\right)}$$

Dimana :

- RM = uang primer (*reserve money*)
- D = uang giral (*demand deposit*)
- C = uang kartal
- R = cadangan
- T = deposito berjangka (*time deposit*)

Rasio uang giral terhadap uang kartal yang diinginkan adalah sebagai berikut :

$$(D/C) d = d_0 + d_1 (Y)$$

untuk memperoleh nilai elastisitas persamaan di atas di rubah dalam bentuk log.

$$\ln (D/C) d = d_0 + d_1 \ln (Y)$$

Rasio deposito berjangka terhadap uang giral yang diinginkan adalah :

$$(T/D) d = e_0 + e_1 (Y) + e_2 (r)$$

untuk memperoleh nilai elastisitas persamaan di atas di rubah dalam bentuk log.

$$\ln (T/D) d = e_0 + e_1 \ln (Y) + e_2 \ln (r)$$



Masyarakat diasumsikan menyesuaikan tingkat rasio yang diinginkan sesuai dengan mekanisme penyesuaian partial seperti pada permintaan uang kartal. Rasio aktualnya dalam bentuk log dapat ditulis sebagai berikut :

$$\ln (D/C)_t = d_0\phi + d_1\phi \ln(Y) + (1 - \phi) \ln (D/C)_{t-1}$$

$$\ln (T/C)_t = e_0\gamma + e_1\gamma \ln(Y) + e_2\gamma \ln(r) + (1 - \gamma) \ln (T/D)_{t-1}$$

Dimana  $\phi$  adalah koefisien penyesuaian untuk rasio uang giral terhadap uang kartal dan  $\gamma$  adalah koefisien penyesuaian untuk rasio deposito berjangka terhadap uang giral.

Definisi uang sempit dan uang luas keduanya diasumsikan tercipta oleh uang primer dan disesuaikan menurut transformasi Koyk (Bijan, 1968:49) sebagai berikut :

$$M_t = m_0 + m_1 \sum_{i=1}^{\infty} (1+k)^{-i} RM_{t-i}; 0 < k < 1 \text{ atau}$$

$$M_t = m_0k + m_1k RM_t + (1-k) M_{t-1}$$

### 3.2.3 Teori Penawaran Uang Menurut Cagan (1965:190)

Cagan mengarahkan studinya pada tiga hal yang spesifik yaitu (1) menggambarkan pergerakan yang bersifat sekuler dan siklis pada uang yang beredar dan mengidentifikasi saluran institusional terjadinya pergerakan itu; (2) melihat saluran-saluran ini mengalisa faktor-faktor di belakangnya yang bekerja, (3) menggunakan faktor-faktor penawaran untuk menghilangkan dampak moneter pada output dan harga-harga. Dalam identitasnya, uang kartal dimasukkan dalam rasio uang kartal terhadap uang beredar ( $C/M$ ) dan cadangan sebagai rasio terhadap deposito ( $R/D$ ), identitas Cagan dinyatakan sebagai berikut:

$$M = H \frac{1}{\frac{C}{M} + \frac{F}{M} - \frac{C}{M} \cdot \frac{R}{D}}$$

Dimana :

C = uang kartal

M = uang beredar

F = uang giral

R = cadangan

D = deposito

Cagan menggunakan identitas ini untuk menganalisa perubahan-perubahan uang yang beredar antara tahun 1875-1968. Hasilnya adalah bahwa pertumbuhan uang primer adalah faktor yang penting mempengaruhi uang yang beredar dalam jangka panjang. Uang primer dipengaruhi oleh stock emas, operasi *federal reserve* dan *treasury*. Uang kartal berfungsi sebagai alat penyimpan kekayaan dan permintaan akan uang kartal tergantung tidak hanya pada kegiatan transaksi yang dipengaruhi pengeluaran dan biaya dan *chcling account*, juga kemauan memegang kekayaan dipengaruhi total kekayaan dari berbagai substitusinya. Rasio C/M tergantung pada sejauh mana uang kartal dan bank-bank komersil berbeda.

#### 3.2.4 Teori Penawaran Uang Menurut Burger ( 1971:98)

Burger berpendapat bahwa ada tiga kriteria dasar dari determinan uang beredar yang harus dipenuhi yaitu (1) secara eksplisit memasukkan variabel kebijaksanaan yang berada di bawah kontrol langsung dari otoritas moneter, (2) mengkaitkan variabel ini dengan agregat moneter, (3) menunjukkan hubungan sebab akibat antara perubahan dalam variabel kebijaksanaan dan berbagai perubahan dalam variabel kebijaksanaan dan berbagai perubahan kondisi institusional. Sesuai dengan Friedman-Schwartz, Burger memperhatikan tiga sektor ekonomi dalam perekonomian (1) otoritas moneter, (2) bank-bank komersil dan, (3) masyarakat non bank, dari definisi  $M = mB$ , Burger menemukan sebagai berikut :

$$M1 = \frac{1 + K}{(r - D(1 + t + d)) + K}$$

$$M1 = \frac{1 + K + t}{(r - b)(1 + t + d)}$$

Oleh karena itu angka pengganda uang M1 dan M2 terdiri dari unsur-unsur rasio K (rasio uang kartal terhadap *demand deposit*), t (rasio deposito *treasurry* terhadap *demand deposit*), b (rasio *reserve borrowing*), dan r (rasio cadangan), d (rasio deposito terhadap cadangan). Hasil utama dan studi yang dilakukan oleh Burger adalah hubungan antara angka pengganda uang *net source of monotery base* yang memperhatikan cara dari



otoritas moneter dapat mempengaruhi proses penciptaan uang yang beredar secara bersama-sama tindakan penyesuaian *portfolio* bank-bank komersil, masyarakat dan *treasury* yang dipengaruhi oleh kebijaksanaan terhadap uang beredar dan dua hasil penelitian lainnya adalah bank sentral dapat menentukan kontrol dalam jangka waktu yang pendek terhadap besarnya *net resource of monetary base* yang diedarkan terhadap bank-bank umum dan masyarakat bukan bank, dan besarnya perubahan *net resource of monetary base* menentukan besarnya uang yang beredar, oleh karena itu maka, jika bank sentral ingin mengontrol jumlah uang yang beredar maka target operasi terkait adalah *net resource of monetary base*.

### 3.2.5 Teori Penawaran Uang Menurut Friedmant-Schwartz ( 1985 : 62)

Friedman menganalisis determinan uang yang beredar dengan menggunakan identitas yang menerangkan uang yang beredar ( dalam arti luas termasuk time deposit ) dari tiga determian yang utama, yaitu uang primer, rasio terhadap total cadangan dan rasio deposito terhadap uang kartal. Ketiga determinan utama ini mencerminkan perilaku dari ketiga sektor ekonomis, dimana otoritas moneter menentukan besarnya uang primer (H), bank-bank komersil menentukan rasio deposito terhadap cadangan (D/R) dan masyarakat menentukan rasio deposito terhadap uang kartal (D/C).

Uang primer atau "*the monetary base*", bank-bank komersial menentukan rasio deposito terhadap cadangan (D/R) dan masyarakat menentukan rasio deposito terhadap uang kartal (D/C). Uang primer atau "*the monetary base*" merupakan kendala dari maksimum uang yang beredar atau diciptakan. Besarnya dapat ditentukan oleh sumber maupun penggunaannya. Friedman dan Schwartz mendasarkan teorinya pada penggunaan uang primer saja yaitu cadangan total bank-bank umum (R) dan uang kartal yang dipegang masyarakat, rasio deposito terhadap cadangan (D/R) tergantung pada besarnya cadangan wajib dan eksploitasi arus uang kartal dan tingkat bunga, juga diperhatikan keputusan bank-bank dalam hal memegang kelebihan cadangannya. Rasio deposito terhadap uang kartal (D/C) tergantung pada tingkat bunga, pendapatan dan preferensi

masyarakat dalam memegang uang kartal. Identitas uang yang beredar dari ketiga determinan tersebut yaitu :

$$M = H \frac{\frac{D}{R} \left( 1 + \frac{D}{C} \right)}{\frac{D}{R} + \frac{D}{C}}$$

Identitas di atas yang mengandung kedua rasio disebut sebagai angka pengganda uang atau *money multiplier*, hasil interksi dari uang primer dan angka pengganda uang ini menentukan perubahan uang yang beredar. Fungsi uang beredar terbentuk melalui reaksi bank-bank umum terhadap selisih dari kelebihan cadangan yang diinginkan (*desired excess reserve*) juga reaksi dari masyarakat umum terhadap selisih antar uang kartal yang diinginkan dipegang dan kenyataan yang terjadi. Apabila otoritas moneter menambah jumlah uang primer maka hal ini akan menyebabkan *actual excess reserve* melebihi *desired excess reserve*, dengan demikian bank-bank umum memperoleh tambahan asset. Sebagai reaksinya maka mereka akan meningkatkan depositonya, dengan demikian akan mengurangi cadangannya. Masyarakat akan menyesuaikan jumlah uang kartal yang dipegangnya. Cadangan yang diperlukan sebagai akibat dari tambahan deposito yang diciptakan akan terus bertambah sampai *actual reserve* sama dengan *desired reserve*. Namun perubahan uang beredar dapat pula terjadi tanpa perubahan uang primer tetapi disebabkan oleh perubahan rasio deposito terhadap uang kartal (D/C) atau rasio deposito terhadap cadangan (D/R). Proses ini jauh lebih kompleks karena rasio-rasio tersebut berhubungan satu sama lain. Dengan kerangka pemikiran seperti di atas Friedman-Schwartz mengemukakan bahwa perubahan didalam uang primer merupakan determinan yang dominan dari pergerakan yang besar dan berjangka pada uang beredar. Perubahan dalam rasio-rasio D/R dan D/C mempunyai pengaruh yang penting pada pergerakan uang yang beredar selama adanya berbagai kepanikan yang bersifat finansial.



### 3.3 Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter atau tindakan pemerintah melalui bank sentral selaku otoritas moneter untuk mempengaruhi situasi makro perekonomian, implikasi kebijakan moneter ini pemerintah menentukan sasaran yang akan dicapai dengan mengontrol alat atau instrumen dari kebijakan sejauh mana efektifitas dari kebijakan yang dijalankan.

#### 3.3.1 Sasaran Kebijakan Moneter

Boediono (1988:137) berpendapat bahwa sasaran akhir yang ingin dicapai dari kebijakan moneter adalah keseimbangan makro ekonomi dengan menekan laju inflasi serendah mungkin. Peningkatan output dan neraca pembayaran luar negeri yang seimbang. Kebanyakan para ahli ekonomi berpendapat bahwa jumlah antara tindakan kebijakan moneter dengan pengaruhnya pada ketiga aspek tersebut memerlukan waktu yang lama. Dengan demikian apabila terjadi kesalahan atau penyimpangan dalam pelaksanaannya akan terlambat untuk mengantisipasinya.

Sasaran yang sering digunakan adalah : pertama dari jalur tingkat bunga, dengan stabilnya tingkat bunga menunjukkan keseimbangan antara permintaan dengan penawaran uang, dengan demikian sasaran akhir dari kebijakan moneter akan dengan mudah dipenuhi. Kedua, dari jalur jumlah uang beredar. Uang beredar dapat diartikan sebagai uang inti atau uang primer. Konsep yang mendasari sasaran antara dari jumlah uang yang beredar ini adalah: a) seberapa jauh pemerintah melalui Bank Sentral dapat mempengaruhi besaran  $M1, M2, M3$ . Semakin mudah pemerintah dapat mempengaruhi akan semakin baik, b) bagaimanakah realitas dari besaran tersebut yang mencerminkan apa yang terjadi dalam sasaran akhir dari kebijakan moneter, semakin akurat semakin baik (Boediono, 1988:147)

Besaran B (uang inti) dapat secara langsung dipengaruhi oleh bank sentral selaku otoritas moneter, dengan demikian dapat dikatakan bahwa uang inti dapat lebih mudah dipengaruhi dibandingkan dengan  $M1$ ,  $M1$  lebih mudah dipengaruhi daripada  $M2$ ,  $M2$

lebih mudah dipengaruhi daripada M3. Atas dasar poin di atas sasaran antara yang baik adalah uang inti.

### 3.4 Angka Pengganda Uang

Konsep atau definisi uang di Indonesia yang terdiri dari uang kartal, uang giral, uang M1, Uang kuasi dan uang M2, maka dengan sendirinya akan dikenal pula berbagai macam angka pengganda uang yaitu: angka pengganda uang kartal (mc), angka pengganda uang giral (md), angka pengganda uang M1 (m1), angka pengganda uang kuasi (mq) dan angka pengganda uang M2 (m2)

Masing-masing angka pengganda uang tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut (Insukindro : 1993 ; 91)

$$CP = mc RM$$

$$DD = md RM$$

$$M1 = m1 RM$$

$$QM = mq RM$$

$$M2 = m2 RM$$

dimana:

CP adalah uang kartal

DD adalah uang giral

M1 adalah uang dalam arti sempit

QM adalah uang kuasi

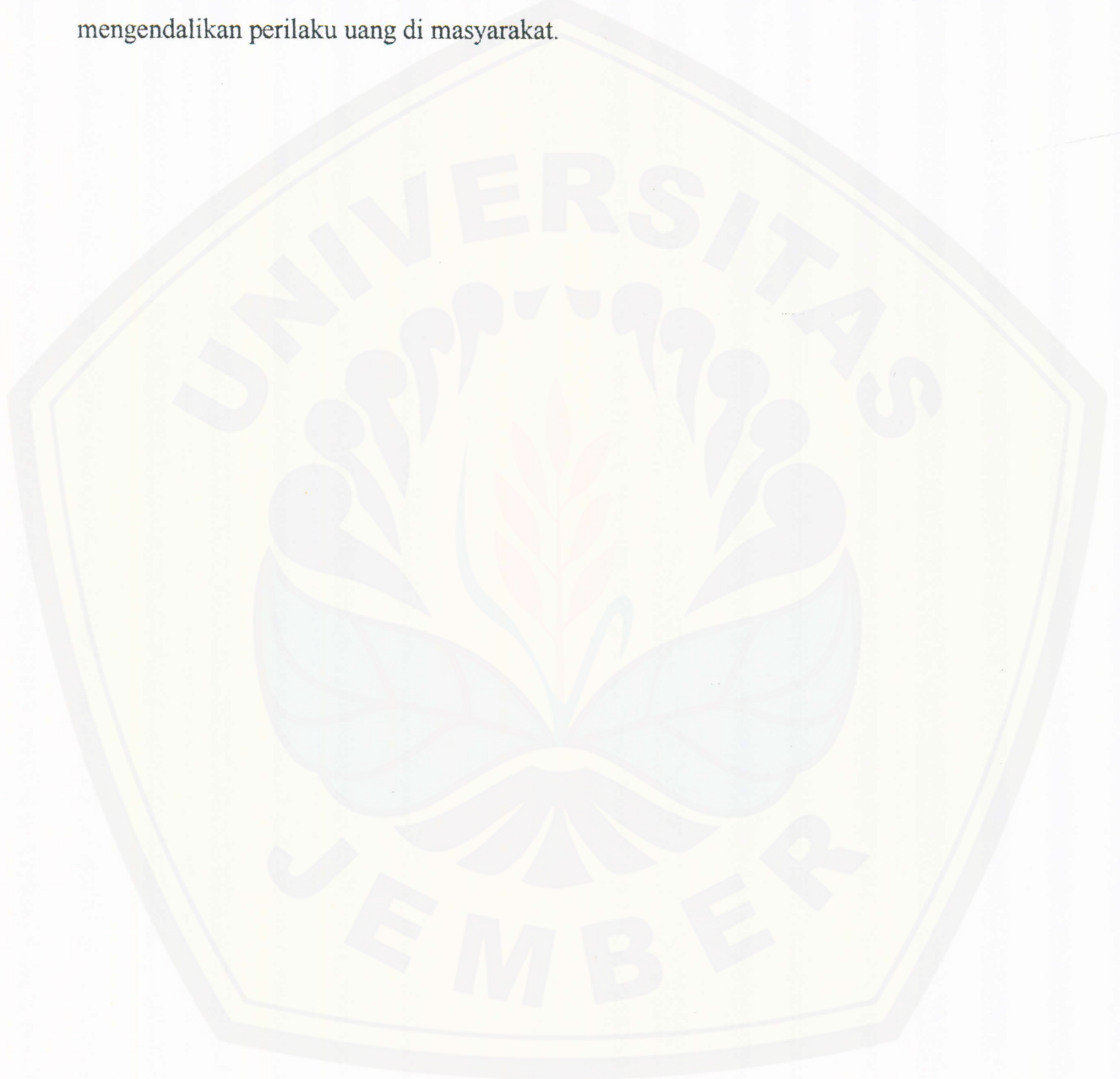
M2 adalah uang dalam arti luas.

RM adalah uang inti

Persamaan-persamaan di atas dapatlah dikatakan bahwa perilaku masing-masing bentuk uang ditentukan oleh angka pengganda uang masing-masing (mc, md, m1, mq, m2) dan variasi uang inti (RM). Perubahan angka pengganda uang dipengaruhi oleh



faktor-faktor yang mempengaruhinya, seperti pendapatan masyarakat, suku bunga, harapan masyarakat mengenai perekonomian dan penentuan cadangan wajib. Semakin stabil angka pengganda uang berarti otoritas moneter mempunyai kemampuan untuk mengendalikan perilaku uang di masyarakat.



#### IV. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

##### 4.1 Hasil Penelitian

Peranan uang dalam perekonomian adalah urat nadi dalam memperlancar jalannya perekonomian suatu negara. Semakin meningkat kegiatan ekonomi nasional maka peranan uang makin luas, uang bukan lagi hanya semata-mata sebagai alat tukar atau alat bayar, tetapi uang berfungsi pula sebagai penyimpan kekayaan, pengukur nilai, satuan hitung dan alat pembayaran berjangka. Semakin maju dan berkembang keadaan perekonomian masyarakat fungsi uang semakin luas (Insukindro, 1993:13)

Peranan uang dalam perekonomian antara lain dapat meningkatkan efisiensi baik bagi produsen, konsumen dan kegiatan ekonomi masyarakat pada umumnya. Pada akhir-akhir ini, salah satu perkembangan penting dalam teori ekonomi moneter adalah analisis mengenai mekanisme penawaran uang. Pendekatan ini menunjukkan bahwa penawaran uang tidak sepenuhnya ditentukan oleh otoritas moneter, akan tetapi ditentukan pula oleh para partisipan di pasar uang dan bank kredit. Dalam perekonomian tertutup perilaku bank-bank umum dan masyarakat merupakan kendala bagi proses penawaran uang, sedangkan dalam perekonomian terbuka proses tersebut juga dipengaruhi oleh perkembangan neraca pembayaran internasional.

Likuiditas perekonomian (M2) secara keseluruhan selama penelitian dari tahun 1996 sampai tahun 1998 mengalami peningkatan. Pada tahun 1996.1 jumlah uang beredar dalam arti luas mencapai Rp. 232.490 milyar, pada tahun 1997.1 mencapai Rp. 294.580 milyar, dan pada tahun 1998.1 mencapai Rp. 449.820 milyar. Demikian juga dengan uang primer, tahun 1996.1 berjumlah Rp 31.167 milyar, menjadi Rp 35.051 milyar tahun 1997.1 dan menjadi Rp 59.412 milyar tahun 1998.



#### 4.1.1 Angka Pengganda Uang Tahun 1996 – 1998

Angka pengganda uang dapat dilihat pada tabel 5 :

Tabel. 5. Perhitungan Angka Pengganda Uang di Indonesia Tahun 1996.1 – 1998.2

Tahun	Kuartal	JUB (M) (Rp)	Uang Inti (B)	Angka Pengganda Uang (M/B)
1996	1	232.492	31.051	7,49
	2	249.443	30.799	8,10
	3	259.926	31.360	8,29
	4	288.632	34.405	8,39
1997	1	294.581	35.353	8,33
	2	312.839	40.431	7,74
	3	329.074	36.638	8,98
	4	355.643	46.088	7,72
1998	1	449.824	59.412	7,57
	2	565.785	70.308	8,05

Sumber : Data Bank Indonesia diolah, Maret 2000.

Angka pengganda uang untuk tahun 1996.1 sebesar 7,49. 1996.2 sebesar 8,10; tahun 1996.3 sebesar 8,29 dan untuk tahun 1996.4 sebesar 8,39 rata-rata 8,07. Tahun 1997.1 sebesar 8,33; tahun 1997.2 sebesar 7,74; tahun 1997.3 sebesar 8,98 dan tahun 1997.4 sebesar 7,72. rata-rata 8,19 Tahun 1998.1 sebesar 7,57; tahun 1998.2 sebesar 8,05 rata-rata 7,81.

Tahun 1996 angka pengganda uang terbesar pada kuartal ke empat.

Tahun 1997 angka pengganda uang terbesar pada kuartal ke tiga.

Angka pengganda uang selama pengamatan terjadi perubahan yang besar.

Jika misalnya bank sentral menetapkan basis sebesar Rp. 100 milyar sedangkan angka pengganda uang yang ada sebesar 7 maka uang yang beredar dimasyarakat sebesar Rp. 700 milyar. Tetapi jika angka pengganda uang sebesar 8 maka jumlah uang yang beredar dimasyarakat sebesar Rp. 800 milyar. Karena angka pengganda uang selalu berubah setiap kuartalnya, maka dengan sendirinya bank sentral tidak dapat dengan pasti menentukan berapakah jumlah uang beredar di masyarakat.

#### 4.1.2 Pertumbuhan Uang Tahun 1996 - 1998

Pertumbuhan uang dari tahun 1996 – 1998 dapat dilihat pada tabel 6.

Tabel. 6. Pertumbuhan Uang Beredar di Indonesia Tahun 1996.1 – 1998.2

Tahun	Kuartal	JUB (M)	Pertumbuhan Uang Beredar $\left[ g = \frac{(M_t - M_0)}{M_0} \times 100\% \right]$ (%)
1995	4	222.638	-
1996	1	232.492	4,43
	2	249.443	7,29
	3	259.926	4,2
	4	288.632	11,04
1997	1	294.581	2,06
	2	312.839	6,26
	3	329.074	5,19
	4	355.643	8,09
1998	1	449.824	26,48
	2	565.785	25,78

Sumber : Data Bank Indonesia diolah, Maret 2000

Laju pertumbuhan uang tahun 1996.1 sebesar 4,43 persen; tahun 1996.2 sebesar 7,29 persen; tahun 1996.3 sebesar 4,20 persen dan tahun 1996.4 sebesar 11,04 persen. Pertumbuhan uang pada tahun 1996 sebesar 26,96 persen atau rata-rata pertumbuhan selama tahun 1996 sebesar 6,74 persen.

Laju pertumbuhan untuk tahun 1997.1 sebesar 2,06 persen; tahun 1997.2 sebesar 6,26 persen; tahun 1997.3 sebesar 5,19 persen dan untuk tahun 1997.4 sebesar 8,09 persen. Pertumbuhan uang pada tahun 1997 sebesar 21,6 persen Rata-rata pertumbuhan selama tahun 1997 sebesar 5,4 persen.

Laju pertumbuhan untuk tahun 1998.1 sebesar 26,48 persen; dan untuk tahun 1998.2 sebesar 25,78 persen. Sampai Juni 1998 pertumbuhan uang sebesar 52,56 persen atau rata-rata pertumbuhan sebesar 26,13 persen.



Laju pertumbuhan uang beredar di Indonesia selama pengamatan sangat tinggi, diatas 25 persen pertahun, hal ini memberikan konsekuensi logis pada pertumbuhan sektor riil yang harus dipacu untuk mengimbangi pertumbuhan uang beredar. Jika pertumbuhan sektor riil lebih rendah dari pertumbuhan uang beredar, maka inflasi tidak dapat dibendung lagi.

Laju pertumbuhan uang pada tahun 1996 tertinggi pada kuartal ke empat. Tahun 1997 laju pertumbuhan uang yang tertinggi pada kuartal ke empat. Untuk tahun 1998 laju pertumbuhan uang tertinggi terjadi pada kuartal pertama. Selama pengamatan laju pertumbuhan uang tertinggi terjadi pada tahun 1998, dimana masa krisis ekonomi sedang berlangsung.

#### 4.2 Pembahasan

Angka pengganda uang yang tidak konstan dan mempunyai nilai yang besar, menandakan bahwa bank sentral tidak mungkin dapat meramalkan angka pengganda uang dengan tepat. Hal ini berarti bahwa bank sentral tidak dapat menetapkan stok uang dengan tepat untuk setiap periode. Misalnya anggaplah bank sentral menginginkan stok uang menjadi Rp. 500 milyar, sedangkan angka pengganda uang sebesar 7,49 dan oleh karena itu menetapkan basis pada Rp 66,76 milyar (500 milyar dibagi 7,49). Karena pada kuartal berikutnya angka pengganda uang berubah menjadi 8,1 maka stok uang menjadi 540,76 milyar (66,76 dikali 8,1) yang berarti stok uang akan berbeda sebesar 8,16 persen dari nilai yang diinginkan oleh bank sentral.

Perilaku uang yang beredar di masyarakat tidak hanya ditentukan oleh otoritas moneter melalui penentuan uang inti, tetapi dipengaruhi pula oleh perilaku masyarakat bank dan non bank. Dengan kata lain perilaku uang beredar ditentukan secara simultan oleh pemeran serta dalam pasar uang dan otoritas moneter melalui kebijakan dan penentuan uang inti.

Tujuan kebijakan moneter adalah untuk menunjang tercapainya stabilitas ekonomi, kebijakan tersebut dilakukan terutama melalui pengaturan jumlah uang beredar. Meskipun pemerintah dapat menentukan besarnya jumlah uang inti, tetapi

perubahan jumlahnya ditentukan oleh interaksi antara masyarakat, lembaga keuangan serta bank sentral. Jika bank sentral ingin menaikkan jumlah uang beredar tingkat bunga akan cenderung turun dan jumlah pemberian kredit akan bertambah. Investasi meningkat, maka kemudian pendapatan nasional secara perlahan-lahan akan meningkat. bank sentral dapat juga mempengaruhi uang beredar dengan kebijakan suku bunga. jika suku bunga tinggi berarti Bank Sentral memperkenalkan laju pertumbuhan uang lambat. Masyarakat dapat mempengaruhi jumlah uang beredar melalui rasio mata uang terhadap deposito, yaitu rasio pemilikan mata uang masyarakat dengan rekening koran di bank dan deposito mereka. Perilaku lembaga bank dapat juga mempengaruhi jumlah uang beredar melalui rasio cadangan deposito (*reserver deposit ratio*). Bank-bank yang mempunyai rekening pada bank sentral dapat menggunakannya untuk melakukan pembayaran di antara mereka (Dornbusch dan Fisher ; 1984 : 328)

Peningkatan kebutuhan masyarakat akan alat likuid dalam suatu perekonomian menjadi salah satu pertimbangan pemerintah untuk menambah uang primer yang ada, selain karena tinggi rendahnya uang primer yang dikeluarkan pemerintah merupakan indikator kestabilan moneter hal tersebut adalahantisipasi terhadap kesulitan likuiditas. Besarnya uang primer mempunyai kecenderungan untuk meningkatnya suku bunga deposito yang ditawarkan pemerintah dan ketentuan cadangan wajib yang ditetapkan.

Variasi jumlah uang primer akan mempengaruhi besarnya jumlah uang beredar di masyarakat. Konsepsi uang primer dan jumlah uang beredar mempunyai hubungan positif dijelaskan oleh Brunner and Meltzer (1968:66). Uang primer dianggap faktor yang membatasi jumlah maksimum jumlah uang beredar, mereka menyimpulkan operasi pasar terbuka yang dilakukan oleh bank sentral adalah faktor penentu dalam variasi *monetary base* (uang primer) yang kemudian menentukan jumlah uang beredar.

Burger (1971:98) berpendapat bahwa besarnya *net source of monetary base* menentukan besarnya jumlah uang beredar, oleh karena itu jika bank sentral ingin mengontrol jumlah uang beredar, maka target operasi terkait adalah *net source of monetary base*. Friedman (1996:62) menyimpulkan bahwa perubahan di dalam uang



primer merupakan determinan yang dominan dari pergerakan yang besar dan berjangka panjang pada uang yang beredar.

Cadangan wajib mempunyai hubungan yang negatif dengan jumlah uang beredar. Hubungan cadangan wajib dengan perubahan jumlah uang beredar adalah melalui persentase dari seluruh deposito milik nasabah yang harus disimpan pada bank sentral. Sisa dari rasio cadangan yang disetorkan oleh bank-bank umum dapat digunakan untuk memberikan kredit pada nasabah, sehingga bank-bank umum dapat mempengaruhi jumlah uang beredar. Semakin tinggi ketentuan cadangan wajib yang ditentukan oleh bank sentral akan mengakibatkan semakin sedikit jumlah uang beredar.

Tingkat suku bunga mempunyai hubungan yang searah dengan jumlah uang beredar, hal ini mempunyai arti bahwa setiap kenaikan tingkat suku bunga deposito akan menyebabkan meningkatnya jumlah dana masyarakat yang ditempatkan pada bank-bank umum khususnya dalam bentuk deposito berjangka, sehingga jika tingkat suku bunga naik maka jumlah uang beredar akan naik.

Laju pertumbuhan uang beredar, tertinggi terjadi pada periode 1998. Sampai kuartal 2 pertumbuhan uang sudah mencapai 52,78 persen, hal ini disebabkan karena adanya gelombang krisis yang melanda Indonesia sejak triwulan 2 tahun 1997, mengakibatkan perkembangan moneter diwarnai oleh situasi yang memprihatinkan sebagai akibat krisis nilai tukar rupiah yang kemudian meluas dengan cepat menjadi krisis ekonomi yang sangat dalam, nilai tukar rupiah semakin lemah karena permintaan terhadap dollar semakin kuat. Besarnya permintaan terhadap dollar menyebabkan intervensi yang dilakukan oleh pemerintah tidak mampu menahan kemerosotan nilai tukar rupiah, situasi tersebut semakin diperburuk oleh munculnya krisis kepercayaan masyarakat terhadap perbankan nasional. Masyarakat secara beramai-ramai menarik uangnya yang disimpan di bank-bank umum baik nasional maupun swasta, akibatnya tak pelak lagi uang beredar semakin besar. Salah satu cara untuk mengatasi krisis tersebut Bank Indonesia melakukan pengetatan likuiditas dengan meningkatkan cadangan wajib minimum dan bank-bank umum meningkatkan suku bunga deposito dengan harapan

dapat menarik kembali uang yang beredar di masyarakat yang pada akhirnya diharapkan menguatkan nilai tukar rupiah.





## V. SIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapatlah ditarik suatu simpulan sebagai berikut:

- 5.1.1 Angka pengganda uang di Indonesia Tahun 1996.1 besarnya 7,49, 1996.2 besarnya 8,10, 1996.3 besarnya 8,29 dan 1996.4 besarnya 8,39. Tahun 1997.1 besarnya 8,33, tahun 1997.2 besarnya 7,74, 1997.3 besarnya 8,98 dan tahun 1997.4 besarnya 7,72 Tahun 1998.1 besarnya 7,57 dan 1998.2 besarnya 8,05. Hal ini menandakan bahwa angka pengganda uang ada kecenderungan untuk berubah setiap kwartalnya.
- 5.1.2 Jumlah uang beredar selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 1996 pertumbuhan uang beredar sebesar 26,98 persen, dengan kenaikan rata-rata setiap kwartalnya sebesar 6,75 persen. Dengan rincian sebagai berikut, 1996.1 sebesar 4,43 persen, 1996.2 sebesar 7,30 persen, 1996.3 sebesar 4,20 persen dan 1996.4 sebesar 11,04 persen. Pada tahun 1997, pertumbuhan jumlah uang beredar sebesar 21,56 persen, dengan kenaikan rata-rata 5,39 persen setiap kwartalnya. 1997.1 sebesar 2,06 persen, 1997.2 sebesar 6,26 persen, 1997.3 sebesar 5,19 persen dan 1997.4 sebesar 8,09 persen. Pada tahun 1998 pertumbuhan jumlah uang cukup mencolok, setelah Indonesia mengalami krisis ekonomi yaitu sebesar 52,26 persen sampai kwartal 2, dengan kenaikan setiap kwartalnya sebesar 26,13 persen. Tahun 1998.1 sebesar 26,48 persen dan 1998.2 sebesar 25,78 persen. Hal ini menandakan bahwa Permintaan akan uang di Indonesia meningkat.

## 5.2 Saran

- 5.2.1 Hendaknya pemerintah berhati-hati didalam menentukan stok uangnya, mengingat angka pengganda uang yang besar dan selalu berubah setiap kwartalnya. Sektor riil harus dipacu pertumbuhannya agar dapat mengimbangi pertumbuhan jumlah uang yang beredar.
- 5.2.2 Walaupun pemerintah tidak dapat dengan tepat menentukan besarnya jumlah uang beredar, namun karena uang primer adalah determinan yang dominan dari perubahan jumlah uang beredar, maka Bank Sentral diharapkan dapat menentukan kontrol terhadap besarnya uang primer, sehingga perekonomian menjadi stabil.



DAFTAR PUSTAKA

- Mooy,Adrianus. 1992. **Tantangan Dan Prospek Perekonomian Indonesia 1992**, Warta ISEI April 1992 No.9, Pengurus Pusat ISEI, Jakarta.
- Nasution,Anwar. 1990. **Tinjauan Ekonomi Atas Dampak Paket Deregulasi 1998 pada Sistem Keuangan Indonesia**, PAU-EK-UI, Jakarta.
- Aghevli Bijan B. 1977. *Money Price and The Balance of Payment* Indonesia 1968 ; 73 Journal of Development Studies,Jakarta.
- Bank Indonesia, **Laporan Mingguan**, Jakarta (dalam beberapa terbitan).
- , **Laporan Tahunan**, Jakarta (dalam beberapa terbitan).
- Biro Pusat Statistik, **Pendapatan Nasional Indonesia**, Tabel-tabel Pokok Keuangan Nasional, Jakarta.
- Boediono. 1988. **Ekonomi Moneter**, BPFE Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Both, Anne and Cowley. 1982. *Modelling The Short-run Demand For Money with Exogeneous Supply*, Economic Inquiry.Chicago.
- Brunner, K and A.H. Meltzer. 1968. *Liquidity Traps For Money Bank Credit and Interest Rate*, The Journal of Political Economy.
- Burger A.E. 1971. *The Money Supply Process*, Belmont Wadworth Publishing Company.
- Cagan, Philip. 1965. *Determinant and effect of Changes in The Stock Money*, National Bureau of Economic Researce Columbia University Press.
- C.F.Scheffer and Smeets,1978, *Transaction cost Approach to the theory of financial intermediation*, Clarendon press, London.
- Dornbush & Fisher, 1992, *The Purchasing Power of Money*, Macmillan.
- Dow and Sivile, 1990, *The Demand For Money, A Dinamic Rational Expectations Model*, Economic Journal.London.

- Dornbush, Rudger and Fisher Stanley, 1992, *Makro Ekonomi*, Alih Bahasa Mulyadi, Jakarta Erlangga.
- Dudlay G. Lucket, 1988, *Uang dan Perbankan*, Erlangga, Jakarta.
- Friedman, Milton (Editor), 1996, *Studies in The Quantity Theory of Money*, The University Chicago Press. Chicago.
- Friedman, Milton and Anna J. Schwart, 1985, *A Monetary History of The United State*, Princeton University Press.
- Insukindro, 1992, **Pembentukan Model dalam Penelitian Ekonomi**, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia no.1 Tahun VIII hal. 148 a.
- Iswara, 1986, **Analisa Penawaran Uang**, Buletin Ekonomi, hal. 14-16
- Indrawati, Sri Mulyani, 1988, **Analisa Permintaan dan Penawaran Uang di Indonesia**, Jurnal Ekonomi, LPEM-UI, Jakarta.
- Nopirin, 1986, **Ekonomi Moneter**, Ringkasan bacaan pikiran, BPFE Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- , 1989, **Ekonomi Moneter I**, BPFE Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Partadiredja, Ace, 1985, **Perhitungan Pendapatan Nasional**, LP3ES, Jakarta.
- Taguchi, 1994, *The Nature of Policy Problem*, Economic Letter.
- Usman, Marzuki, 1987, **Industri Perbankan di Tahun 1990-an**, Untaian karangan keuangan dan perbankan Indonesia, Infobank ISEI cabang Jakarta, Jakarta